DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG - REPUBLIK INDONESIA

- LAPORAN -

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



Periode Januari - Februari 2021

pelayanan prima
berbasis teknologi informasi
untuk pengadilan dan masyarakat
www.ditjenmiltun.net

LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA DITJEN BADILMILTUN

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Jakarta
Pada hari : Kamis, 25 Februari 2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara,
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM

Drs. H. Ach. Jufri, SH.,MH.
NIP. 19680318 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan masyarakat pengguna layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, 25 Februari 2021

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Maksud Dan Tujuan 5

1.3. Landasan Hukum 6

1.4. Rencana Kerja 6

BAB II. METODOLOGI 8

2.1. Metode Penelitian 8

2.2. Populasi Dan Sampel 8

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 8

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 8

2.5. Teknik Analisis Data 9

2.6. Tahapan pelaksanaan 9

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 11

3.1. Profil responden 11

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator 12

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Ditjen Badilmiltun 14

BAB IV PENUTUP 16

4.1. Kesimpulan 16

6.4. Rekomendasi 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintah yang bersih dan melayani.

Ditjen Badilmiltun merupakan Unit esselon I yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap, gratifikasi dan penyalah gunaan wewenang.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Ditjen Badilmiltun ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
7. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

  Dilakukan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelengara Pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan.
  1. Kuesioner.
  2. Bagian dari kuesioner / pengantar.
  3. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
  1. Jumlah Responden.
  2. Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan Jadwal.

  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitan dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioaner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 2 bulan (enam kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang dugunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka – angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Ditjen Badilmiltun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan mengisi kuisioner yang terdapat pada website Ditjen Badilmiltun., yaitu www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data – data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Ditjen Badilmiltun.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas). Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas akan mengecek kerja petugas

pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar – benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 3. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 3 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajkan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Kuesianer dilakukan dengan cara sebagai berikut :

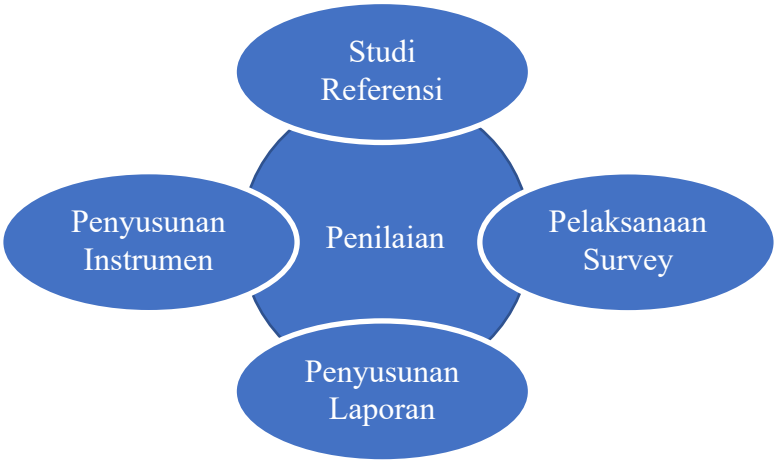
1. Pertama, menentukan bobot total dari masing – masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata – rata setiap indikator.
2. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 3 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 – 100 dan dikemudian dibagi 4.
3. Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1- 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin Bersih dari Korupsi.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum Tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Perbuatan Curang
2	Hadiah
3	Transaksi Rahasia
4	Penyalahgunaan Jabatan
5	Manipulasi Peraturan
6	Pencaloan

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 -1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Ditjen badilmiltun mayoritas memiliki latar pendidikan S-1 sebesar 44,42 % dan Pascasarjana 52,49%

Tabel 3

Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	SMA/SLTA	9	9,8
2	Diploma (D1/D2/D3/D4)	1	1,1
3	Sarjana (S1)	52	44,42
4	Pasca Sarjana (S2/S3)	44	52,49

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukan bahwa sebesar 55 % responden pengguna layanan pada Ditjen Badilmiltun yang lebih berkepentingan adalah Hakim.

Tabel 4

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Hakim	58	55
2	Panitera/PP	28	26
3	Staf Pengadilan	20	19
	Jumlah	106	100

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Unit Pelayanan : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Alamat : Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lt. 9 – 10, Jalan Jenderal Ahmad yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Tabel 5

Hasil Perhitungan Survey Indeks Persepsi Korupsi

Responden	Nilai Ruang Lingkup Pelayanan						Ket
	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	3	3	
3	3	3	3	3	3	3	
4	3	3	3	3	3	3	
5	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	3	3	3	3	
7	3	3	3	3	3	3	
8	3	3	3	3	3	3	
9	3	3	3	3	3	3	
10	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	3	3	3	
13	3	3	3	3	3	3	
14	3	3	3	3	3	3	
15	3	3	3	3	3	3	
16	3	3	3	3	3	3	
17	3	3	3	3	3	3	
18	3	3	3	3	3	3	
19	3	3	3	3	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	
21	3	3	3	3	3	3	
22	3	3	3	3	3	3	
23	3	3	3	3	3	3	
24	3	3	3	3	3	3	
25	3	3	3	3	3	3	
26	3	3	3	3	3	3	
27	3	3	3	3	3	3	
28	3	3	3	3	3	3	
29	3	3	3	3	3	3	
30	3	3	3	3	3	3	

31	3	3	3	3	3	3	
32	3	3	3	3	3	3	
33	3	3	3	3	3	3	
34	3	3	3	3	3	3	
35	3	3	3	3	3	3	
36	3	3	3	3	3	3	
37	3	3	3	3	3	3	
38	3	3	3	3	3	3	
39	3	3	3	3	3	3	
40	3	3	3	3	3	3	
41	3	3	3	3	3	3	
42	3	3	3	3	3	3	
43	3	3	3	3	3	3	
44	3	3	3	3	3	3	
45	3	3	3	3	3	3	
46	3	3	3	3	3	3	
47	3	3	3	3	3	3	
48	3	3	3	3	2	3	
49	3	3	3	3	3	3	
50	3	3	3	3	3	3	
51	2	3	3	3	3	3	
52	3	3	3	3	3	3	
53	3	3	3	3	3	3	
54	3	3	3	3	3	3	
55	3	3	3	3	3	3	
56	3	3	3	3	3	3	
57	3	3	2	3	3	3	
58	3	3	3	3	3	3	
59	3	3	3	3	3	3	
60	3	3	3	3	3	3	
61	3	3	3	3	3	3	
62	3	3	3	3	3	3	
63	3	3	3	3	3	3	
64	3	3	3	3	3	3	
65	3	3	3	3	3	3	
66	3	3	3	3	3	3	
67	3	3	3	3	3	3	
68	3	3	3	3	3	3	
69	3	3	3	3	3	3	
70	3	3	3	3	3	3	
71	3	3	3	3	3	3	
72	3	3	3	3	3	3	
73	3	3	3	3	3	3	
74	3	3	3	3	3	3	
75	3	3	3	3	3	3	
76	3	3	3	3	3	3	
77	3	3	3	3	3	3	
78	3	3	3	3	3	3	
79	3	3	3	3	3	3	
80	3	3	3	3	3	3	
81	3	3	3	3	3	3	

82	3	3	3	3	3	3	
83	3	3	3	3	3	3	
84	3	3	3	3	3	3	
85	3	3	3	3	3	2	
86	3	3	3	3	3	3	
87	3	3	3	3	3	3	
88	3	3	3	3	3	3	
89	3	3	3	3	3	3	
90	3	3	3	3	3	3	
91	3	3	3	3	3	3	
92	3	3	3	3	3	3	
93	3	3	3	3	3	3	
94	3	3	3	3	3	3	
95	3	3	3	3	3	3	
96	1	3	3	3	3	3	
97	3	3	3	3	3	3	
98	3	3	3	3	3	3	
99	3	3	3	3	3	3	
100	3	3	3	3	3	3	
101	3	3	3	3	3	3	
102	3	3	3	3	3	3	
103	3	3	3	3	3	3	
104	3	3	3	3	3	3	
105	3	3	3	3	3	3	
106	3	3	3	3	3	3	
Jumlah	315	318	317	318	317	317	
NRR Per RL	2,972	3	2,991	3	2,991	2,991	
NRR T-timbang	0,493	0,498	0,496	0,498	0,496	0,496	2,979
Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 33)							**98,294**
Nilai Konversi Interval (NI x 33)/25							**3,93**

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari Indeks 6 Indikator tersebut diatas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Ditjen Badilmiltun **sebesar 3,93**

Tabel 6

Persepsi Anti Korupsi Ditjen Badilmiltun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 -1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden terhadap kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring komentar dari responden untun mempertahankan kualitas pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun komentaer dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Komentar dan Pandangan Pengguna Layanan

Komentar dan Pandangan pengguna layanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
1. Pertahankan SDM dalam rangka mencapai RB 2. Ditjen Badimiltun sudah pasti bersih dan layak untuk mendapatkan apresiasasi zona integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK). 3. Lebih digiatkan layanan 4. Tetap jaga integritas 5. Pelayanan sangat baik 6. Cukup sudah luarbiasa bagus 7. Ditjen Badilmiltun bersih dari pungutan liar 8. Perlu transparansi sebagai wujud akuntabilitas.. 9. Ditjen Badilmiltun selalu jadi teladan kami 10. saya bersyukur bahwa selama ini saya tdk pernah mengalami hal-hal yang tidak berkenaan dan menurut saya pelayanan Ditjen Badilmiltun selama ini sangat baik dan memuaskan sekali, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua 👏🙏 11. Tetap menjaga integritas 12. Ditjenbadilmiltun selalu memberikan pelayanan yg terbaik kepada kami tanpa ada imbalan apapun 13. Tetap ditingkatkan 14. Agar terus dipertahankan. 15. Pelayanan kepada hakim tingkat pertama semakin cepat dan lebih baik.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bulan Januari – Februari 2021 diperoleh informasi bahwa pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki **Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 6 indikator yang masing – masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 8

Indeks Persepsi Korupsi per – ruang lingkup

No	Ruang Lingkup	Indeks
1	Perbuatan Curang	2,972
2	Hadiah	3
3	Transaksi Rahasia	2,991
4	Penyalahgunaan Jabatan	3
5	Manipulasi Peraturan	2,991
6	Pencaloan	2,991

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Periode Januari s/d Februari 2021 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 81,26 atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI.**



Survey Persepsi Anti Korupsi

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kami sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memetakan persepsi pengguna layanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui Survei Persepsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2020, kami berharap dapat memetakan potensi korupsi untuk mendorong perbaikan layanan serta membangun etos kerja layanan yang bersih dan bebas korupsi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas Bapak/Ibu dalam mengisi seluruh data survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu upaya pemberantasan korupsi di wilayah NKRI. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden.
Atas kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Deskripsi (opsional)

Umur *

Teks jawaban singkat

Jenis Kelamin *

- ◯ Laki - Laki
- ◯ Perempuan

Pendidikan Terakhir *

1. SMA/SLTA
2. Diploma (D1/D2/D3/D4)
3. Sarjana (S1)
4. Pasca Sarjana (S2/S3)

2. Menurut pengalaman, apakah Saudara/i memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh Ditjen Badilmiltun (meskipun tidak diminta), baik dalam bentuk barang ataupun uang? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

3. Menurut pengalaman Saudara/i, apakah terdapat informasi yang menyatakan bahwa di Ditjen Badilmiltun terdapat oknum-oknum petugas yang melakukan praktik korupsi? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

4. Apakah Saudara/i pernah ditawari untuk memperoleh pelayanan Ditjen Badilmiltun yang lebih cepat dan mudah dengan meminta imbalan (uang atau barang) tertentu oleh petugas Ditjen Badilmiltun ? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

2. Menurut pengalaman, apakah Saudara/i memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh Ditjen Badilmiltun (meskipun tidak diminta), baik dalam bentuk barang ataupun uang? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

3. Menurut pengalaman Saudara/i, apakah terdapat informasi yang menyatakan bahwa di Ditjen Badilmiltun terdapat oknum-oknum petugas yang melakukan praktik korupsi? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

4. Apakah Saudara/i pernah ditawari untuk memperoleh pelayanan Ditjen Badilmiltun yang lebih cepat dan mudah dengan meminta imbalan (uang atau barang) tertentu oleh petugas Ditjen Badilmiltun ? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

5. Apakah Saudara/i pernah dipersulit oleh petugas Ditjen Badilmiltun (walaupun saya sudah memenuhi persyaratan layanan) untuk mendapatkan layanan Ditjen Badilmiltun dan terindikasi dugaan petugas tersebut menghendaki imbalan (uang atau barang) tertentu? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

6. Apakah Saudara/i pernah dihubungi oleh seseorang (yang mengatasnamakan Ditjen Badilmiltun) untuk mendapatkan layanan Ditjen Badilmiltun tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh Ditjen Badilmiltun? *

- a. Tidak pernah
- b. Kadang kadang
- c. Selalu

Catatan tambahan (bila dianggap perlu)

Teks jawaban panjang